

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam suatu negara pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan dilakukan melalui proses yang terencana dan mencakup segala aspek kehidupan. Pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dan berkeadilan untuk menjamin warganya berada dalam taraf hidup layak dan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera (Sumarto & Dwiantara, 2019).

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional salah satunya adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah yaitu kesenjangan antara desa dengan kota. Pesatnya pembangunan di perkotaan diiringi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Sedangkan di perdesaan, kondisi sarana dan prasarana masih kurang memadai sehingga menjadi permasalahan lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di perkotaan menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Fenomena ini disebabkan karena masyarakat desa meninggalkan

desanya untuk mencari pekerjaan demi memperoleh kehidupan yang lebih baik di kota.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, politik, dan partisipasi dalam kehidupan di masyarakat, yang dihadapi masyarakat pedesaan, hingga saat ini belum bisa diselesaikan. Pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan di desa dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 78 ayat (1) berbunyi: pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa digelontorkan mulai dari tahun 2015 sampai dengan saat ini data yang berhasil dirangkum sampai dengan tahun 2018 yaitu Indonesia mampu membangun jembatan 1.960 kilometer, jalan sepanjang 121.709 kilometer, tambatan perahu 5.116 unit, bangunan pendidikan anak usia dini (PAUD) 21.357 unit, Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) air bersih sebanyak 32.711 unit, posyandu 13.973 unit, Polindes 6.041 unit, drainase 21.811 unit, embung 2.047 unit, MCK 82.356 unit, penahan tanah 291.393 unit, pasar desa 5.220 unit, sarana olahraga 2.366 unit, sumur 45.865 unit.

Sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memenuhi pelayanan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan bisa mendorong perekonomian di desa yang pada akhirnya bisa menekan angka kemiskinan masyarakat desa.

Padat Karya merupakan salah satu bentuk Community Driven Development (CDD), yaitu pengembangan masyarakat yang menekankan pada kontrol komunitas terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya investasi (PKN-STAN, 2018). Menurut Nagamatsu (2014), cash for work (CfW) adalah suatu metode untuk membantu korban yang terdampak bencana alam dengan cara mengikutsertakan dalam berbagai macam pekerjaan yang mencakup rekonstruksi dan pemulihan paska bencana, serta membayar upah. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang pernah ditulis oleh Irfan Sofi (2020) yang berjudul implementasi padat karya tunai dana desa untuk masyarakat miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dalam pengimplementasian program padat karya tunai di desa terhadap jumlah pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, obyek yang digunakan dalam penelitian ini yakni masyarakat miskin yang ada di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dalam rangka untuk mengetahui apakah dengan di implementasikannya program padat karya tunai ini dapat meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat miskin yang ada di desa Salulemo. Dengan melihat kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Pengaruh program padat karya tunai terhadap jumlah pendapatan masyarakat miskin di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah program padat karya tunai berpengaruh terhadap jumlah pendapatan masyarakat miskin yang ada di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program padat karya tunai terhadap jumlah pendapatan masyarakat miskin yang ada di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh program padat karya tunai terhadap pendapatan masyarakat miskin.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan dan bukti empiris mengenai pengaruh program padat karya tunai terhadap pendapatan masyarakat miskin.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2) Manfaat Praktis

Sebagai referensi yang akan datang, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan referensi penelitian yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, dimana Desa Salulemo ini telah menerapkan program padat karya tunai pada pembangunan infrastruktur Desa dengan sumber biaya melalui dana Desa.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang menjadi target program padat karya tunai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Definisi Padat Karya Tunai

Padat Karya Tunai (Cas for work) merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Program ini arahan langsung dari Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Sekretaris KEMENKO. Dengan skema Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan Dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pengaturan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Ada 2

(dua) hal yang menjadi sasaran program padat karya tunai, yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 pada pada ayat 1 paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian alokasi dana desa dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan operasional badan permusyawaratan desa insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

2.1.2 Kebijakan Padat Karya Tunai Dana Desa

Program padat karya tunai bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat, menekan jumlah pengangguran, setengah

pengangguran dan masyarakat miskin, dan membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa (Kementerian PPN/ Bappenas, 2018).

2.1.3 Sasaran dan Prinsip Pelaksanaan PKT Dana Desa

Sasaran program PKT Dana Desa berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian PPN/Bappenas adalah 1) Pengangguran, yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, 2) Setengah Pengangguran, yaitu Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 Jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, 3) Penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan, dan 4) Stunting, yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi. Sedangkan prinsip pelaksanaan PKT dana desa yaitu :

- 1) Inklusif, Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.
- 2) Partisipatif dan Gotong Royong, Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang

mendampingi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa secara partisipatif dan gotong royong.

- 3) **Transparan dan Akuntabel**, Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
- 4) **Efektif**, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.
- 5) **Swadaya**, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan asset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga Desa yang berkecukupan.
- 6) **Prioritas**, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.
- 7) **Swakelola**, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan secara mandiri oleh Desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di Desa.
- 8) **Keberlanjutan**, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

- 9) Disepakati dalam musyawarah desa, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah Desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.
- 10) Berbasis Kewenangan Lokal Desa dan Hak Asal Usul, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 11) Kewenangan yang ditugaskan kepada desa, Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penentuan Upah, Batas Bawah dan Batas Atas Upah/ Hari Orang Kerja (HOK) ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun batas atas upah/HOK dibawah upah minimum provinsi. besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh peraturan bupati/walikota.

2.1.4 Definisi Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja usaha atau sebagainya, Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan (Bina Grafika, 2014).

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok (Bina Grafika, 2014).

2.1.5 Definisi Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga

kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu daerah, jadi masalah kemiskinan ini harus dapat diberantas sampai ke akar-akarnya (Wirawan, 2015).

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

2.1.6 Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan perdesaan adalah segala daya upaya yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat (dalam arti luas) didalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang ada untuk mencapai pertumbuhan desa yang adil, merata, sejahtera, mandiri dan berkelanjutan. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan perdesaan, diantaranya 1) pertumbuhan (growth), 2) pemerataan (enquity), 3) kesejahteraan (welfare), 4) kemandirian, 5) keberlanjutan, dan 6) partisipatif (Muta;ali Lutfi, 2016).

Lebih lanjut Muta;ali Lutfi, (2016) menyampaikan bahwa ruang lingkup dalam pengembangan perdesaan meliputi : 1) pembangunan

sarana prasarana pedesaan , 2) pemberdayaan masyarakat, 3) penguatan asset pedesaan melalui pengelolaan SDA dan SDM, 4) penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin), 5) penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan, 6) penguatan sistem kelembagaan dan penataan tata ruang kawasan pedesaan.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik (Margareni, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Sofi Irfan, Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, 2020	Implementasi Padat Karya Tunai, Dana Desa, Masyarakat Miskin.	Metode ini menggunakan teknik validasi data secara trigulasi yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKT Dana Desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin dengan

				minimal 55 tenaga kerja yang bisa terserap dalam setiap kegiatan
2	Anak Agung Gede Rai Budiasa, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika, Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih Gianyar, 2019	Padat Karya Tunai, implementasi Kebijakan, masyarakat Miskin	Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dengan analisis temuan	Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, yaitu : Implementasi kebijakan PKT di Desa Lebih, Gianyar berdasarkan kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumberdaya yang dikerahkan
3	Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M., Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading, 2021	Program Padat Karya Tunai, Dana Desa, Mengatasi Kemiskinan.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian didapat, bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari

				<p>empat aspek sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi yang belum maksimal, Sumberdaya belum cukup memadai, Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, dan hanya Disposisi/Sikap sudah cukup memadai, Adapun kendala yang dihadapi yaitu Sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan terjadi konflik kecil berupa protes dari warga Desa yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa dan beredarnya isu bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga dan kerabat sebagai pekerja/penerima upah Padat Karya Tunai Desa</p>
4	Herdiyana Deni, Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap	Padat Karya Tunai, Dana Desa, Kebijakan Implimentasi	Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini apabila dilaksanakan di desa yang sudah

	Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Prov. Jawa Barat dan Riau, 2019		kualitatif dengan teknik survei dan diskusi/ wawancara mendalam di daerah/desa sampel	mandiri dan maju dikarenakan fasilitas infrastruktur desa sudah tersedia dan memadai, sehingga tidak efektif apabila program PKT tetap dilaksanakan di desa mandiri dan maju tersebut
5	Gusti Y., Agustar A., Osmet, Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2020	Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode survey dengan populasi target seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil analisis regresi linear sederhana yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis uji t dengan tingkat kesalahan = 5%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara Dana Desa dengan penurunan KK miskin atau peningkatan jumlah dana desa tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan
6	Dahliat, Dkk., Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dengan Pendekatan Analisis Swot di Desa Stowe Brang	Strategi, Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Analisis SWOT	Penelitian ini menggunakan teori yang berdasarkan pada analisi swot yang di kemukakan oleh Siagian dalam penentuan Alternatif	Hasil penelitian bahwa strategi yang tepat untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di desa stowe berang kecamatan utan adalah strategi pemanfaatan dana

	Kecamatan Utan, 2020		Startegy	desa untuk peningkatan kapasitas masyarakat agar memiliki kompetensi, strategi pemanfaatan dana desa dan tenaga pendamping professional dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat ,dan trategi peningkatan koordinasi atau kerja sama antara pemerintah desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat
7	Ujang Endi Kurnia, Ni Wayan Widhiasthin, Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021	Evaluasi, Padat Karya Tunai, Pemberdayaan	Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan	Hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur
8	Winda Ayuning Lestari, Dkk., Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan	Belimbing, Kawasan Argopolitan, Program Padat Karya Tunai, Partisipasi	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei	Hasil penelitian menunjukkan : (1) Umur masyarakat termasuk dalam kategori umur 36-55 tahun, dengan rata-rata tingkat

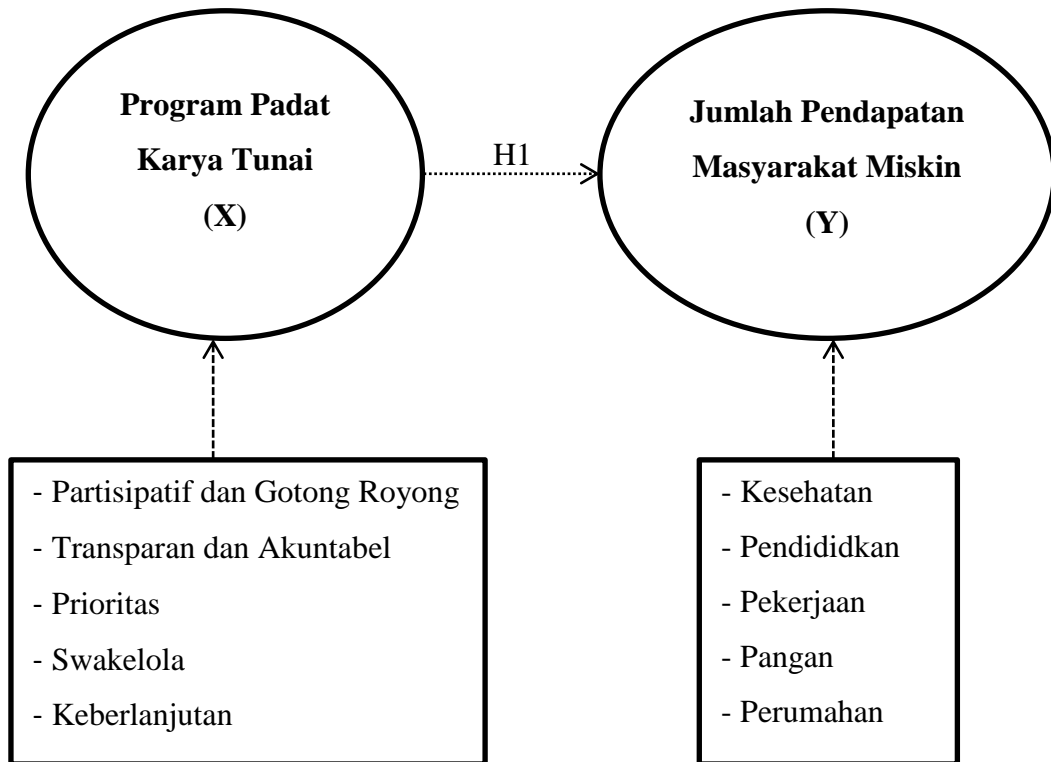
	<p>Program Padat Karya Tunai di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, 2019</p>		<p>pendidikannya tamat SLTA/ Sederajat, luas kepemilikan lahan $\leq 0,3$ Ha, tingkat pendapatan sektor usaha tani $>2,1$ juta, lamanya tinggal rata-rata >21 tahun, dengan tingkat kekosmopolitan termasuk kategori sangat rendah dan stakeholder termasuk kategori cukup aktif. (2) Tingkat partisipasi masyarakat termasuk dalam kategori partisipasi sedang dan berada pada tangga konsultasi. (3) Uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan signifikan terhadap partisipasi masyarakat yaitu luas kepemilikan lahan, tingkat pendapatan dan tingkat kekosmopolitan, sedangkan umur, tingkat pendidikan, lamanya tinggal,</p>
--	---	--	---

				dan stakeholder tidak berhubungan secara signifikan
9	Rajab Lubis, Dkk., Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, 2018	Pogram Padat Karya Tunai Desa, Koto Tinggi, Silpa, Infrastruktur Desa.	Metode penelitian yang dilakukan menyebarkan kuesioner dihitung menggunakan indek kepentingan dari faktor-faktor efektivitas program padat karya tunai desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah	Hasil penelitian di peroleh dari 18 responden dan diperoleh kesimpulan bahwa faktorfaktor efektivitas pembangunan infrastruktur di desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah menurut pendapat aparat desa berdasarkan nilai indeks kepentingan tertinggi = 3,55 adalah disebabkan oleh efektivitas terhadap aspek perencanaan dan jadwal kegiatan pembangunan infrastruktur
10	Ni Kadek Bella Kurnia Agustini, Made Kembar Sri Budhi, Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesempatan Kerja Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, 2018	Dana Desa, Kesempatan Kerja, Tingkat Kemiskinan	Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu <i>Path Analysis</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, (2) dana desa dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan (3) kesempatan kerja merupakan

				variabel intervening pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
11	Yenni Gust, Dkk., Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, 2020	Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan	Penelitian ini menggunakan metode survey dengan populasi target seluruh nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan	Hasil analisis regresi linear sederhana yang dilandjutkan dengan pengujian hipotesis uji t dengan tingkat kesalahan = 5%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa tidak terjadi hubungan yang signifikan antara Dana Desa dengan penurunan KK miskin atau peningkatan jumlah dana desa tidak diiringi dengan penurunan angka kemiskinan

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian teoritis yang di kemukakan di atas hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H : Diduga bahwa ada pengaruh program padat karya tunai terhadap jumlah pendapatan masyarakat miskin di desa Salulemo kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian meliputi : populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan analisis data. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti dari masyarakat miskin yang ada di desa Salulemo kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara. Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, yaitu data yang diperoleh dari kantor Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sugiyono (2014:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin desa Salulemo kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara yang merupakan target Program Padat Karya Tunai desa berjumlah 47 Orang.

3.2.2 Sampel

Sugiyono (2014:120) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin desa Salulemo kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara yang merupakan target Program Padat Karya Tunai desa berjumlah 47 Orang.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran misalnya, umur, penghasilan seseorang, dan jumlah masyarakat miskin yang ada di desa Salulemo kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara dan data lainnya yang menunjang penelitian.

3.3.2 Sumber Data

1) Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer. Data yang digunakan merupakan data yang langsung diambil dari obyek penelitian yang didapatkan dari jawaban responden melalui pengisian kuisioner yang sudah dibuat oleh penulis.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, dalam hal ini data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada pada Kantor desa Salulemo kecamatan Sukamaju kabupaten Luwu Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Kuesioner

Menurut Sugiyono (2011), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kelebihan menggunakan kuesioner adalah dalam waktu yang relatif singkat dapat memperoleh data yang banyak, tenaga yang diperlukan sedikit dan responden dapat menjawab dengan bebas tanpa pengaruh orang lain.

3.4.2 Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi tersebut.

3.5 Variabel Penelitian

Tabel 3.1
Variabel Penelitian

Variable	Definisi	Indikator
Program Padat Karya Tunai (X)	Padat Karya Tunai (Cas for work) merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Salulemo, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Desa Salulemo sekaligus mendukung penurunan angka stunting.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipatif dan Gotong Royong 2. Transparan dan Akuntabel 3. Prioritas 4. Swakelola 5. Keberlanjutan
Jumlah Pendapatan Masyarakat Miskin (Y)	Pendapatan masyarakat miskin merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Pekerjaan 4. Pangan 5. Perumahan

	tidak langsung untuk memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, yaitu makanan dan non makanan.	
--	---	--

3.6 Instrument Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Di dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

3.6.2 Uji Realibilitas

Menurut Ghozali (2018:45) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak.

3.7 Analisis Data

3.7.1 Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linear sederhana adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh program padat karya tunai terhadap jumlah pendapatan masyarakat miaskin Persamaan regresi linear sederhana untuk mengukur variabel X terhadap variabel Y yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

X = Variabel Bebas (Padat Karya Tunai)

Y = Variabel Terikat (Pendapatan Masyarakat Miskin)

e = Error Term

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

3.8 Hipotesis Pegujian

1) Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini

ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika probabilitas $H_a > 0,05$ maka dinyatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas $H_a < 0,05$ maka dinyatakan signifikan (Ghozali, 2018).

2) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi terletak pada 0 dan 1. Klasifikasi koefisien korelasi yaitu, 0 (tidak ada korelasi), 0-0,49 (korelasi lemah), 0,50 (korelasi moderat), 0,51-0,99 (korelasi kuat), 1.00 (korelasi sempurna). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

1) Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ibukota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang berjarak 430 Km ke arah utara kota Makassar Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara berada pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara Kondisi wilayah Kabupaten Luwu Utara bervariasi terdiri dari daerah pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah dan landai.

Secara geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada 010 53' 19" - 02° 55' 36" Lintang Selatan, dan 119° 47' 46" - 120° 37' 44 Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 Km² dengan jumlah Penduduk 321.979 Jiwa dan secara administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 11 Kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi. Terdapat sekitar 8 (Delapan) sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 3 Kecamatan, yaitu Sabbang, Baebunta dan Malangke.

Iklim Luwu Utara termasuk iklim tropis, suhu udara minimum 25,30 0C dan suhu maksimum 27,90 0C dengan kelembaban udara rata-rata 83%. Menurut pencatatan stasiun pengamatan (SP) Bone-Bone secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 9 hari dengan jumlah curah hujan 76. Stasiun Pengamatan Amasangan mencatat secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 hari dengan curah hujan 226. Sedangkan berdasarkan Stasiun Pengamatan Malangke secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 11 hari dengan jumlah curah hujan 247, dan Stasiun Pengamatan Sabbang mencatat bahwa secara rata-rata jumlah hari hujan sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan 256.

Dari 11 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Seko dengan luas 21.109,19 Km² dan luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas 93,75 Km².

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 tercatat sebanyak 305.468 jiwa yang terdiri dari laki-laki 153.246 jiwa (50,17%), perempuan 152.222 jiwa (49,83 %) yang tersebar di 11 Kecamatan.

Jumlah penduduk terbesar yakni 47.907 jiwa (15,68%) mendiami Kecamatan Bone-Bone dan jumlah penduduk yang terkecil yakni 2.999 jiwa (0,98%) jiwa mendiami Kecamatan Rampi.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2008 telah mencapai 41 jiwa per Km^2 . Kecamatan Malangke Barat adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatannya 283 jiwa / Km^2 dan paling rendah adalah kecamatan Rampi yaitu 2 jiwa per Km^2 .

Dengan luas wilayah tercatat 7.502, 58 Km^2 , Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2008 telah meliputi 11 Kecamatan, 167 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 2.109,19 Km^2 atau 28 % dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Utara dan 1.565,65 Km^2 atau 21 % dari total luas Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Seko juga adalah kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 198 Km. Dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat (1 %) yang letaknya dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara berjarak 44 Km.

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 11 kecamatan, 171 desa yang semuanya merupakan desa defenitif. Dari 171 desa tersebut terdapat 4 (Empat) desa sudah termasuk dalam klasifikasi daerah perkotaan atau sudah dalam bentuk kelurahan. Ke-empat kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kappuna, Kelurahan Bone, Kelurahan Kasimbong dan Kelurahan Baliase. Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan dengan

jumlah desa terbanyak, yaitu 25 desa dan UPT. Sedangkan Kecamatan Rampi adalah paling sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 desa.

2) Gambaran Umum Desa Salulemo

Kantor Desa Salulemo beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Salulemo, terletak pada koordinat 120° , $474' 36''$ BT, $-2,599' 31''$ LS, dimana Desa Salulemo berbatasan : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaluku, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolangi, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saptamarga, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju.

Luas wilayah Desa Salulemo sekitar $4,10 \text{ KM}^2$ terdapat 5 (lima) Dusun dengan jumlah penduduk sampai pada Semester Pertama Tahun 2022 adalah Laki-Laki 977 Jiwa dan Perempuan 877 Jiwa dengan jumlah total penduduk sebanyak 1.854 Jiwa serta jumlah Kepala Keluarga sebanyak 472 KK. Dimana memiliki potensi pada sektor pertanian Padi dan Kelapa Sawit (Profil Desa Salulemo, 2022).

Desa Salulemo merupakan salah satu Desa induk di Kecamatan Sukamaju namun pada Tahun 1665 Desa Salulemo. Dipimpin oleh Bapak Ibrahim pada Tahun 1973 Desa Salulemo di mekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Salulemo, Desa Tolangi dan Desa Saptamarga. Sejak resmi menjadi Desa Salulemo melakukan pemilihan kepala desa sebanyak 7 kali seperti tabel berikut ;

Tabel 4.1
Daftar Kepala Desa Salulemo

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Periode
1	Ibrahim	1277-1988	2
2	Amirullah	1989-1995	1
3	Saptono Asutra	1995-2007	2
4	Najamuddin	2007-2019	2
5	Touris, S.Sos	2019-2020	Pj. Sementara
6	Rudy, S.Sos	2020-2021	Pj. Sementara
7	Najamuddin	2021-2027	1

Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah demokratis dan berkeadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada Kabupaten/Kota. Kebijakan terbatas pada daerah Provinsi sedangkan Desa ditempatkan pada pengakuan otonomi asli.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mengatur mengenai Desa (Bab XI), Desa pada pasal 93 sampai pasal 111, merupakan masa transisi dan memberikan landasan yang kuat menuju development community, dimana Desa tidak merupakan level administrasi terendah, tidak lagi bawahan daerah tetapi lebih merupakan independent community.

Dengan demikian dalam pengaturan pemerintahan Desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran, termasuk Peraturan Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam rangka pemberdayaan Desa, maka diharapkan mewujudkan kondisi pemerintahan Desa yang kuat dan mandiri, guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan tersebut, maka perlu dikembangkan agar menjadi kondisi yang kuat dan mandiri adalah sebagai berikut:

- Penataan pengembangan desa, kerjasama antar desa dan lembaga adat
- Penataan dan pengembangan lembaga pemerintahan Desa
- Peningkatan kapasitas aparatur Desa
- Penataan dan pengembangan pendapatan kekayaan daerah dan keuangan Desa
- Meningkatkan ketahanan mesyarakat
- Pemantapan nilai-nilai sosial budaya setempat
- Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat
- Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
- Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Maka Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Pelaksana Kewilayahan
- d. Pelaksana Teknis

Dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan sesuai dengan jabatannya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang ada.

Tabel 4.2
Daftar Aparatur Pemerintah Desa Salulemo

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Najamuddin	Laki-Laki	Kepala Desa
2	Rasyid	Laki-Laki	Sekretaris Desa
3	Sitti Ramlah IB. SE	Perempuan	Kasi Pemerintah
4	Samsu	Laki-Laki	Kasi KPPM
5	Arsal	Laki-Laki	Kaur Keuangan
6	Mayawarni	Perempuan	Kaur Umum
7	Kasmat	Laki-Laki	Kadus Salulemo
8	Margiyem	Perempuan	Kadus Harapan
9	Narwis	Laki-Laki	Kadus Sipatuo
10	Syamsuddin	Laki-Laki	Kadus Tonyaman
11	Ahmad.Yani	Laki-Laki	Kadus Mekar

Desa Salulemo merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah Petani Padi Buru Tani dan Petani Kebun.

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Salulemo Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama lima tahun yaitu tahun 2014 s/d tahun 2019. Dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Visi dan Misi adalah suatu gambaran target/tujuan pembangunan yang merupakan cita-cita masa depan desa yang ingin dicapai berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa tersebut. Penyusunan Visi dan Misi Desa Salulemo dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua komponen di dalam Desa Lapapa antara lain: Pemerintah Desa, Pengurus BPD, Lembaga Masyarakat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta masyarakat pada umumnya.

Visi : terciptanya pembangunan desa salulemo yang berkesinambungan di bidang pertanian dan perkebunan.

Misi :

1. Mewujudkan desa salulemo yang sejaterah dan mandiri
2. Menata pembangunan infrastruktur desa
3. Menciptakan keadaan aman, tertib dalam masyarakat
4. Memberikan pelayanan yang mudah terhadap kepentingan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Desa Salulemo tersebut diatas, mustahil akan tercapai tanpa dukungan dan peranan dari seluruh komponen masyarakat serta dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara terutama bidang Pertanian dan Perikanan. Desa Salulemo adalah salah satu desa dalam lingkup kecamatan Sukamaju yang memiliki potensi yang sangat besar yaitu penghasil Padi, dan Kelapa Sawit. Namun selama ini belum terkolola dengan baik sehingga hasilnya pun belum maksimal sehingga masyarakat Salulemo masih mempunyai penghasilan yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena sekitar 75 % lokasi persawahan yang berada di desa Lapapa masih kategori tadah hujan. Oleh karena itu untuk memanfaatkan lahan pertanian di desa Salulemo yang luasnya kurang lebih 204 ha tersebut, maka seharusnya dibangun irigasi yang memadai sehingga dapat mengairi sawah di desa Salulemo tesebut.

Salah satu strategi dan arah kebijakan desa Salulemo adalah terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, Transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan pokok terbentuknya suatu Desa adalah terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintah Desa

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan prinsip demokratis, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dengan mengedepankan hak-hak asasi manusia sesuai dengan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat. Strategi dan arah kebijakan desa terdiri dari beberapa bagian antara lain:

1. Strategi

- a. Bidang Aparatur Pemerintah Desa

- Peningkatan kualitas Penyelenggara Pemerintah Desa di bidang Administrasi di tempuh melalui peningkatan SDM Perangkat Desa
- Peningkatan Pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam Kerja

- b. Bidang Pertanian, perikanan dan perkebunan

- Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan dapat meningkat melalui penyuluhan.
- Peningkatan kualitas bibit melalui pemberian bantuan bibit/komoditi yang unggul bagi petani padi, ikan dan kakao
- Pemberian pupuk gratis kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani

c. Bidang Kesehatan

- Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui Posyandu
- Peningkatan kualitas hidup bagi usia lanjut melalui Posyandu Lansia.

2. Arah Kebijakan

a. Khusus Aparatur Pemerintah Desa

- Menganggarkan dana pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa
- Peningkatan kedisiplinan bekerja bagi perangkat desa
Selain itu dalam dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam pemerintahan desa Sepakat ada beberapa yang perlu menjadi perhatian utama antara lain:
- Pemantapan kerangka aturan: yakni Penetapan penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa Tentang Desa.
- Pemantapan kelembagaan yaitu; Penataan Organisasi Pemdes, BPD, BUMD, Asosiasi Pemdes, Lembaga Adat, LKMD dll.
- Pemantapan keuangan Desa yaitu: pengembangan sumber-sumber pendapatan desa, Pemantapan sistim informasi dan

administrasi pemerintahan desa yang mudah, cepat dan murah, pemantapan standarnisasi, kriteria, norma dan prosodur dalam peningkatan sumber daya Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Adat, LKMD dll.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan di Desa Salulemo berjalan dengan baik. Dari segi pemerintahan telah berjalan dengan baik sesuai dengan Tugas pokok masing-masing, kegiatan pembangunan berjalan dan berpedoman pada RPJMD untuk jangka lima tahun dan dijabarkan setiap tahunnya kedalam Recana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dituangkan dalam APBDDesa dan menjadi landasan utama dalam pembangunan tahunan desa Saulemo.

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang. Adapun Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa ;

a. Sarana Jalan;

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di aspal dan keadanya masih ada yang rusak. Jalan lingkungan untuk tiap dusun belum semuanya di rabat beton atau di paving.

b. Sarana Irigasi;

Saluran irigasi yang ada di Desa Salulemo masih dalam Proses pengerjaan, sehinga fungsinya belum maksimal.

c. Sarana Telekomunikasi dan informasi;

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon

gengam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat.

4.1.2 Karakteristik Responden

Perlu diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Salulemo yang telah terdaftar sebagai pekerja Program Padat Karya Tunai, jumlah Pupulasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 47 orang. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel jenuh maka jumlah sampel yang dijadikan responden sebanyak 47 orang. Keseluruhan sampel tersebut akan dideskripsikan kedalam 2 deskripsi yakni berdasarkan jenis kelamin dan umur. adapun bahasan mengenai karakteristik responden tersebut dapat dilihat pada bahasan berikut :

1. Karakteristik Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin

Persentase jenis kelamin reponden berjenis kelamin laki-laki dan perempuan seperti terlihat pada table berikut ini.

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	47	100%
Perempuan	0	0%
Jumlah	47	100%

Dari table di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang (100%), sedangkan perempuan (0%), hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden berjenis kelamin laki-laki pada pekerja Program Padat Karya Tunai Desa Salulemo. Maka peranan laki-laki mutlak mendominasi sebagai pekerja Program Padat Karya Tunai.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tersebut Antara usia 25-39 tahun 40-49 tahun, dan 50-58 tahun. Persentase usia responden dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
25-39	26	55%
40-49	14	30%
50-5	7	15%
Jumlah	47	100%

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 23-39 tahun dengan persentase 55% yaitu sebanyak 26 responden. Kemudian responden yang berada pada usia 40-49 tahun sebanyak 14 responden dengan persentase 30%. Sementara itu responden responden yang berusia Antara 50-58 tahun sebanyak 7 responden dengan persentase 15%. Hal ini berarti bahwa pekerja Program Padat Karya Tunai

pada Desa Salulemo yang dominan adalah pekerja yang berumur 25-39 tahun.

4.1.3 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel. Di dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka butir atau pertanyaan atau variabel tersebut dinyatakan tidak valid.

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian validitas terhadap semua responden, untuk melihat apakah instrument atau indikator yang digunakan valid atau tidak. Berikut merupakan hasil uji validitas terhadap semua responden:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Program Padat Karya Tunai

Variabel	No Item	Correted Item Total Correlation	Rtabel ($\alpha=5\%$) DF=N-2	Keterangan
X Program Padat Karya Tunai	1	0,783	0,288	Valid
	2	0,690	0,288	Valid
	3	0,877	0,288	Valid
	4	0,658	0,288	Valid
	5	0,807	0,288	Valid

Berdasarkan tabel 4.5 di atas variabel Program Padat Karya Tunai (X), menunjukkan bahwa seluruh pearson correlation memiliki nilai lebih besar dari r tabel, artinya bahwa seluruh pernyataan yang ada bersifat valid. Seluruh pernyataan tersebut bisa dijadikan alat ukur yang valid dalam analisis berikutnya.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pendapatan Masyarakat Miskin

Variabel	No Item	Correted Item Total Correlation	Rtabel ($\alpha=5\%$) DF=N-2	Keterangan
Y Pendapatan Masyarakat Miskin	1	0,769	0,288	Valid
	2	0,589	0,288	Valid
	3	0,782	0,288	Valid
	4	0,767	0,288	Valid
	5	0,659	0,288	Valid

Berdasarkan table 4.6 di atas variabel Pendapatan Masyarakat Miskin (Y), menunjukkan bahwa seluruh pearson correlation memiliki nilai lebih besar dari r tabel, artinya bahwa seluruh pernyataan yang ada bersifat valid. Seluruh pernyataan tersebut bisa dijadikan alat ukur yang valid dalam analisis berikutnya.

4.1.4 Uji Realibilitas

Uji Realibilitas melakukan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner dalam sebuah penelitian konstuk. Kuesioner dapat dikatakan *reable* jika jawaban konsisten dari waktu ke waktu. Suatu variabel *reable* jika nilai $(\alpha) > 0,6$.

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti telah melakukan uji realibilitas terhadap 47 responden, untuk mengetahui apakah pernyataan atau indikator yang digunakan di anggap reliabel atau tidak. Berikut ini adalah hasil pengujian realibilitas 47 responden.

Tabel 4.7
Hasil Uji Realibilitas Variabel X dan Y
Reliability Statistics

Variabel	Cronbach`s Alpha	N of Items
Program Padat Karya Tunai (X)	0,818	5
Pendapatan Masyarakat Miskin (Y)	0,747	5

Berdasarkan tabel 4.7 data hasil pengujian realibilitas Variabel Program Padat Karya Tunai (X) di atas 5 indikator memiliki *Cronbach`s Alpha* 0,818 yaitu lebih besar dari 0,6 serta Variabel Pendapatan

Masyarakat Miskin (Y) di atas 5 indikator memiliki *Cronbach's Alpha* 0,747 yaitu lebih besar dari 0,6. Berdasarkan ketentuan diatas maka indikator – indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

4.1.5 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi seberapa besar hubungan positif Program Padat Karya Tunai terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan serta perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	13,034	1,954			6,662	,000
Program Padat Karya Tunai	,384	,047		,619	7,613	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat Miskin

Dari Tabel 4.8 diatas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 13,034, sedangkan nilai Program Padat Karya Tunai (b/koefisien regresi) sebesar 0,384. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + Bx + e$$

$$Y = 13,034 + 0,384X + e$$

Hasil persamaan diatas dapat diterjemahkan :

1. Konstanta sebesar 13,034 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Pendapatan Masyarakat Miskin sebesar 13,034
2. Koefisien regresi X sebesar 0,384 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai Program Padat Karya Tunai akan bertambah sebesar 0,384.

Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh Program Padat Karya Tunai (variabel X) terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin (variabel Y) adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Program Padat Karya Tunai (X) berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Masyarakat Miskin (Y).

4.1.6 Uji t

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila nilai signifikan (Sig.) lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel yang lain. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Nilai t tabel dengan alpha 5% dan jumlah sampel n dikurangi k jumlah variabel yang digunakan maka diperoleh t tabel sebesar 1,679.

Tabel 4.9
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,034	1,954		6,662	,000
Program Padat Karya Tunai	,384	,047	,619	7,613	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Masyarakat Miskin

Pada Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 7,613 lebih besar dari nilai t tabel 1,679 dengan nilai sigifikansi $0,00 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa Program Padat Karya Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin karena nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Program Padat Karya Tunai yang ada di Desa Salulemo memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

4.1.7 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Program Padat Karya Tunai (X) terhadap Jumlah Pendapatan Masyarakat Miskin (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan Koefisien Determinasi (KD).

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,619 ^a	,378	,374	5,345

a. Predictors: (Constant), Program Padat Karya Tunai

Dari hasil Tabel 4.10 menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,619. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,378 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Program Padat Karya Tunai) terhadap variabel terikat (Pendapatan Masyarakat Miskin) adalah sebesar 37,8%. Sedangkan sisanya sebesar sebesar 62,2% di sebabkan oleh factor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

4.2 Pembahasan

Analisis regresi liner sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi

seederhana. Jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait.

Variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah : variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik, atau variabel X karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X). Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak (random), namun variabel yang dipengaruhi harus selalu variabel acak. Analisis regresi adalah salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan.

Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel – variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Tujuan analisis regresi untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Prinsip dasar pada persamaan regresi linear sederhana adalah bahwa antara variabel dependen (Y) dengan variable independennya (X) harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas,

berdasarkan teori, dari hasil penelitian sebelumnya, atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu.

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio (Mulyono, 2019).

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa Program Padat Karya Tunai berpengaruh positif terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin, artinya dengan adanya Program Padat Karya Tunai maka akan menambah jumlah pendapatan masyarakat miskin yang ada di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Adapun hasil pengujian sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 13,034 yang mengandung arti bahwa nilai konsistensi variabel Pendapatan Masyarakat Miskin sebesar 13,034. Koefisien regresi X sebesar 0,384 yang menyatakan bahwa penambahan 1% nilai Program Padat Karya Tunai akan bertambah sebesar 0,384. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh Program Padat Karya Tunai (variabel X) terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin (variabel Y)

adalah positif. Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Program Padat Karya Tunai (X) berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Masyarakat Miskin (Y).

2. Nilai t hitung sebesar 7,613 lebih besar dari nilai t tabel 1,679 dengan nilai sigifikansi $0,00 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa Program Padat Karya Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin karena nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Program Padat Karya Tunai yang ada di Desa Salulemo memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.
3. Besarnya nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,619. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,378 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (Program Padat Karya Tunai) terhadap variabel terikat (Pendapatan Masyarakat Miskin) adalah sebesar 37,8%. Sedangkan sisanya sebesar sebesar 62,2% di sebabkan oleh factor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian ini didukung oleh bukti empiris dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Irfan Sofi (2020). Bahwa pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Dana Desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat miskin dengan minimal 55 tenaga kerja yang

bisa terserap dalam setiap kegiatan. Rata-rata pemenuhan HOK 30 persen telah dilakukan oleh Desa melalui refokusing atau perubahan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Program Padat Karya Tunai terhadap Jumlah Pendapatan Masyarakat Miskin di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara dan berbagai uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat simpulkan bahwa Program Padat Karya Tunai yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Pendapatan Masyarakat Miskin di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

5.2 Saran

Program Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa khususnya masyarakat miskin yang ada di desa. Dengan adanya Program Padat Karya Tunai di desa sejalan dengan tujuannya yakni untuk meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, pengangguran serta orang tua yang memiliki anak yang stunting. Dengan ini penulis berharap Program Padat Karya Tunai ini akan terus di programkan oleh pemerintah desa karna telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

Adapun pengelolaan Program Padat Karya Tunai ini harus di programkan dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip kerja Program Padat

Karya Tunai agar program ini berjalan dengan baik sehingga dapat mengatasi minimnya pendapatan masyarakat miskin yang ada di desa.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan variabel-variabel yang di dalam penelitian ini belum dicantumkan serta memperhatikan dengan jelas factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendatan masyarakat miskin yang ada di desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Anak Agung Gede Rai Budiasa, A.A. Gede Raka, dan I Made Mardika, (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih Gianyar.
- Dahliati, Dkk, (2020). Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dengan Pendekatan Analisis Swot Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan.
- Dewa Murti, Moehammad Fathorrazi, Fivien Muslihatinningsih, (2017). Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Keluarga Miskin di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.
- Gusti Y., Agustar A., Osmet, (2020). Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Ni Kadek Bella Kurnia Agustini, Made Kembar Sri Budhi, (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesempatan Kerja Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Vol 10 (10).
- Ni Ketut Widya Purnama Sari, I Nengah Kartika, (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penduduk Miskin di Kawasan Bali Timur Provinsi Bali.
- Prayona, G, H., Wisnumurti, A, A, G, O., Mardika, I, m . (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2): 71-70.
- Rajab Lubis, Dkk., (2018). Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah.
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *PERSPEKTIF*, 10 (2): 739-753.
- Sari Wulandari, Dkk., (2022). Kesenjangan Pendapatan yang Memicu Kemiskinan di Indonesia.
- Sofi Irfan, (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
- Ujang Endi Kurnia, Ni Wayan Widhiasthin, (2021). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Vol 5 (1).

Winda Ayuning Lestari, Dkk., (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Program Padat Karya Tunai di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban Vol 43(2).

Yenni Gust, Dkk., (2020). Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Pelatan Vol. 4 (2).